

2.7. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.

Analisis permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang pembangunan secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan sehingga dapat memetakan berbagai permasalahan bidang pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan daerah Maluku.

Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap Bidang dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan bidang pembangunan guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah dengan berbagai keberhasilan yang telah dicapai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada berbagai bidang pembangunan sebagai berikut.

2.7.1. Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang masih dihadapi di bidang **Kesehatan** antara lain masih rendahnya Status kesehatan ibu dan anak yang ditandai dengan rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, masih tingginya kematian ibu melahirkan, terbatasnya akses dan tingginya biaya pelayanan kesehatan akibat kendala terutama di daerah terpencil dan terisolir, serta masih tingginya angka kematian bayi.

Status gizi masyarakat yang masih rendah merupakan permasalahan lainnya di Bidang Kesehatan. Meskipun status gizi balita buruk terus menurun di Maluku namun status balita gizi kurang terus mengalami peningkatan.

Keberhasilan pembangunan bidang **Pendidikan** di Maluku masih ditandai dengan sejumlah permasalahan yang akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Maluku. Tingkat pendidikan penduduk di Maluku masih perlu mendapat perhatian sebagaimana ditunjukkan oleh indikator Angka Melek Huruf cenderung berfluktuasi, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Maluku

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Maluku cenderung meningkat tetapi masih timpang antar jenjang pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses atau peningkatan jangkauan pelayanan pendidikan harus terus ditingkatkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan harus dibarengi pula dengan peningkatan mutu tenaga pendidik melalui sertifikasi atau pendidikan lanjutan serta distribusi guru secara merata antar sekolah dan antar wilayah di Maluku.

Pemerintah Daerah terus menggalakkan berbagai program dan kegiatan di bidang **Pemuda dan Olahraga** untuk meningkatkan Partisipasi dan peran aktif pemuda serta prestasi dan budaya olahraga yang dirasakan masih rendah. Beberapa faktor yang masih menghambat peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda serta prestasi dan budaya olahraga adalah : terbatasnya prasarana dan sarana olahraga; terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan, disamping masalah-masalah sosial yang dihadapi di kalangan pemuda seperti kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba.

Masalah yang masih dirasakan di Bidang **Agama** adalah masih sering dimunculkan atau dieksploitasinya isu-isu perbedaan agama dalam beberapa konflik terakhir di Maluku, masih memunculkan pola-pola lama seperti konflik tahun 1999. Untuk itu, Pemerintah Daerah Maluku akan terus memperkuat kerukunan intern dan antarumat beragama untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni, baik dalam fasilitasi pertemuan tokoh-tokoh agama, dan kerjasama antar umat beragama dalam menjaga perayaan hari-hari besar dan kegiatan keagamaan secara aman dan damai.

Masih adanya konflik sosial, masalah kriminalitas, dan masalah sosial lainnya menunjukkan bahwa Kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat sangatlah beragam. Sebagian besar kelompok masyarakat telah memiliki semangat dan kemauan kuat untuk memahami, menghayati, dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran agamanya, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menghayati dan mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak dipungkiri masih terdapat penyimpangan ajaran agama yang muncul ditengah-tengah masyarakat.

Di Bidang **Kebudayaan** tidak terpungkiri bahwa daerah Maluku sebagai daerah kepulauan kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional. Namun demikian, Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya kita ini semakin berkurang, sehingga perlu dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat.

Interaksi budaya antarbangsa di era globalisasi dan informasi ini semakin kuat. Proses interaksi budaya tersebut di satu sisi berpengaruh positif terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku masyarakat. Namun disisi lain, dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti semakin mudarnya penghargaan pada nilai budaya, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air. Untuk itu, Pemerintah Daerah Maluku akan terus memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Maluku.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjadi mainstream (arus utama) pembangunan nasional dan khusus di daerah Maluku, karena masih banyaknya permasalahan yang dihadapi di bidang ini. Pemberdayaan perempuan di Maluku sudah semakin tinggi namun masih belum merata antar wilayah. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam bidang Politik. Perempuan yang telah duduk di DPRD Provinsi Maluku sudah relative tinggi, sementara di daerah kabupaten/kota masih relative rendah.

Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan Beberapa permasalahan yang masih dalam perlindungan anak adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini, yang mencakup pelayanan tumbuh kembang anak; derajat kesehatan dan gizi anak; serta pengasuhan dan perlindungan anak. Permasalahan lainnya adalah masih terdapat anak yang tidak bersekolah, yang terutama disebabkan oleh kemiskinan. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah Maluku akan meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Perlindungan Masyarakat Miskin terus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Maluku, karena tingkat kemiskinan di daerah masih relatif besar dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Untuk itu, Pemerintah Daerah Maluku terus mendorong peningkatan dukungan anggaran untuk perlindungan masyarakat miskin di Bidang Pendidikan melalui Wajib belajar 12 tahun dan Jaminan Kesehatan Daerah untuk mendukung berbagai program perlindungan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

2.7.2. Sarana dan Prasarana Wilayah

Pemerintah Daerah Maluku terus mendorong pembangunan sarana dan prasarana wilayah di Maluku. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah telah dibangun berbagai sarana dan prasarana transportasi, terumata pada jalur Trans Maluku, pengembangan dan pembangunan Bandar udara serta mendorong percepatan pembangunan jalur penyeberangan nasional sabuk Tengah dan sabuk Selatan yang melewati wilayah Maluku.

Terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Maluku dan alokasi APBN dari pemerintah pusat, sehingga kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun di daerah ini masih terbatas. Sejumlah permasalahan yang sedang dihadapi saat ini di bidang **infrastruktur jalan** di Maluku, antara lain meliputi : (1) Kondisi jalan Provinsi dalam keadaan mantap mencapai 562,43 Km atau 43,35% dan tidak mantap mencapai 734,97 Km atau 56,65%.

Pembangunan **jaringan Irigasi fungsional** masih terbatas, saat ini hanya terbangun seluas 14.684 hektar dari target sebesar 34.910 hektar hingga tahun 2014. Sementara itu, penyediaan air bersih masih terbatas, hanya mencapai 39,5% dari yang direncanakan sebesar 52,5% di tahun 2014.

Permasalahan dalam pembangunan bidang **perumahan dan permukiman** adalah masih adanya permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni dan terbatasnya infrastruktur dasar permukiman (air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase).

Di Bidang **Perhubungan Laut**, masih terbatasnya sarana pelabuhan penyeberangan, kapal penyeberangan, dermaga pelabuhan sehingga berimplikasi pada akses masyarakat.

Di Bidang **Perhubungan Udara**, Landasan Bandar Udara Tual, Saumlaki, Dobo dan Lapangan terbang Perintis Banda, Wahai, Amahai, Kisar, Namrole, Namlea, Larat masih terbatas; Belum tersedia lapangan terbang di TEPA, MOA, dan ILWAKI.

Permasalahan di Bidang **Komunikasi dan Informatika** adalah masih terbatasnya layanan jaringan telekomunikasi terutama di daerah kawasan perbatasan, daerah kabupaten pemekaran, dan daerah yang masih terisolasi. Pemerintah telah membangun Jaringan telepon melalui Desa berdering pada 375 desa di Maluku hingga tahun 2014 dari yang direncanakan sebanyak 710 desa.

Di Bidang **Energi dan Sumberdaya Mineral**, Rasio elektrifikasi di Maluku terus meningkat dan telah mencapai mencapai 60,95%. Terdapat beberapa daerah dan terutama daerah perdesaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan Buru Selatan belum terjangkau layanan listrik secara memadai.

2.7.3. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang

Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Provinsi Maluku sangat dinamis, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten/kota di Maluku. mengantisipasi dinamika pemanfaatan ruang dalam pembangunan di Maluku, kebutuhan dokumen perencanaan spatial di kabupaten dan kota menjadi sangat penting. Dari sebelas kabupaten/kota, 10 kabupaten/kota telah selesai Perda RTRW-nya, kabupaten SBB sementara dibahas di tingkat Legislatif. Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku tahun 2007-2027 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009, dokumen ini belum mengakomodir tiga kabupaten pemekaran, dengan demikian pada tahun 2013 pemerintah daerah mengajukan revisi terhadap Perda dimaksud, sementara ini revisi peraturan daerah hasil pembahasan eksekutif dan legislative sementara di evaluasi di Kemeterin Dalam Negeri. Sementara itu, Daerah Maluku juga merupakan kawasan rawan bencana, seperti rawan terhadap bencana alam gempa bumi dan tsunami, tanah longsor, dan banjir.

2.7.4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang urusan perencanaan pembangunan, antara lain meliputi :

- Dokumen perencanaan yang disusun seperti RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan RKPD masih belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan. Dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa daftar kebutuhan (*wish list*). Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Dengan kata lain, masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.
- Masih terdapat ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan. Hal ini mengakibatkan dokumen perencanaan daerah akan menjadi dokumen legal formal yang bersifat statis, yang kurang optimal dalam mengawal dan mengakselerasi proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih sulit untuk memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah daerah untuk mewujudkan prioritas pembangunan dan anggaran yang dikeluarkan. Program dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pada umumnya sulit diukur dan belum memiliki standar kinerja yang jelas (atau tidak dapat segera diukur dalam pengertian per unit keluaran ataupun biaya per unit; dan ukuran pencapaian kinerjanya).

2.7.5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Permasalahan pembangunan IPTEK di Maluku masih ditandai dengan terbatasnya kemampuan sumber daya iptek (jumlah SDM, kepakaran, kekayaan intelektual, sarana dan prasarana serta anggaran), kelembagaan iptek (organisasi, regulasi, koordinasi, intermediasi), serta jaringan iptek (intersektor; antarsektor; antarpemangku kepentingan; antar kementerian; serta antarpusat dan daerah).

Dari sisi sumberdaya, kemampuan SDM litbang sebagai penyedia solusi teknologi masih perlu ditingkatkan. Di sisi anggaran, investasi untuk penguasaan iptek melalui anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan litbang masih terbatas. Restrukturisasi atau peleburan Badan Litbang Provinsi Maluku menjadi satu sub bidang litbang di Bappeda Provinsi Maluku telah mengurangi jumlah anggaran untuk Litbang secara drastis.

Sementara itu, restrukturisasi kelembagaan ini telah mengurangi secara drastis jumlah SDM yang menangani program dan kegiatan atau masalah di bidang litbang. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM ini Pemerintah Daerah terus meningkatkan koordinasi antarlembaga penelitian, baik antara program, antara produk penelitian yang ada di berbagai lembaga penelitian, maupun antara program dan produk yang telah dilaksanakan di masa lampau. Namun demikian upaya ini masih belum optimal sehingga berakibat pada efisiensi kegiatan litbang di Maluku menjadi kurang optimal.

Pemerintah Daerah terus mendorong pula penguatan komunitas peneliti melalui komunikasi antar pakar-pakar iptek di Maluku maupun dengan pakar nasional agar mampu menjadikan mereka sebagai satu kolega kerja yang menumbuhkan ilmu dan pengetahuan dalam skala komunitas yang lebih luas atau yang sering disebut dengan *invisible college*.

Permasalahan dalam koordinasi litbang adalah belum optimalnya kolaborasi antara lembaga litbang pemerintah dan perguruan tinggi dengan industri. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya alokasi dana litbang yang disediakan oleh industri. Tambahan pula, lembaga litbang pemerintah dan perguruan tinggi belum menjadi sumber gagasan inovasi bagi industri.

Sementara itu, permasalahan dalam pengembangan jaringan litbang adalah pembangunan iptek yang masih belum menjadi arus utama (*mainstream*); lemahnya sinergi kebijakan iptek (belum optimalnya integrasi program, koordinasi, harmonisasi kegiatan, dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik intra lembaga/aktor penghasil Iptek, maupun antarpenghasil iptek dengan pengguna iptek, atau secara umum lemahnya koordinasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan pembangunan Iptek); dan lemahnya budaya iptek.

2.7.6. Politik

Demokrasi di Maluku telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana masyarakat Maluku dalam kehidupan berpolitik bisa dikategorikan baik karena berbagai agenda politik baik secara nasional maupun lokal tetap terlaksana dengan baik, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2013, sampai dengan Pemilu Legislatif tahun 2014. Kondisi politik di Maluku semakin berkualitas tersebut tetap akan dijaga sehingga tidak memunculkan insiden unjuk rasa yang diwarnai dengan tindakan anarkis.

2.7.7. Keamanan dan Ketertiban

Kehidupan sosial masyarakat yang majemuk di Provinsi Maluku baik dari aspek agama, budaya, ekonomi dan sosial politik dapat menjadi faktor pemersatu sekaligus sebagai faktor pemicu konflik sosial dan tidak jarang menjadi konflik horizontal dan vertikal. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan yang penting dan strategis yang berpengaruh dalam menjamin tertib dan lancar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku selalu konsisten melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk menciptakan stabilitas keamanan di Maluku.

Pemerintah Maluku memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk selalu memperbaiki permasalahan keamanan dan ketertiban secara terus menerus dan tuntas dengan melibatkan semua pihak termasuk TNI dan POLRI. Secara umum saat ini kondisi keamanan di Provinsi Maluku aman terkendali.

2.7.8. Hukum dan Aparatur

Masalah yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan birokrasi adalah penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan antara lain berupa tindak pidana korupsi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Maluku terus mendorong terciptanya penegakan hukum terhadap berbagai kasus penyalahgunaan wewenang baik yang masih dalam proses pemeriksaan oleh instansi pengawasan yang berwenang maupun yang telah dilimpahkan ke pengadilan cukup mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Maluku masih menghadapi salah satu permasalahan yang telah mendapat perhatian pemerintah daerah yakni adanya kecenderungan pembentukan organisasi/instansi baru tanpa didasarkan pada hasil evaluasi dan pengkajian (audit organisasi) secara mendalam. Pembentukan organisasi atau instansi baru ini lebih sering didasarkan pada desakan instansi di tingkat pusat untuk dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Kondisi ini tidak jarang membebani anggaran pemerintah daerah yang sangat sangat terbatas, karena tidak disertai dengan peningkatan dana transfer, khususnya DAU secara memadai.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang SDM Aparatur antara lain adalah belum tertatanya secara baik jumlah, distribusi dan kualitas PNS daerah. Permasalahan lainnya, adalah profesionalisme, integritas dan netralitas PNS perlu ditingkatkan; dan masih rendahnya kinerja pegawai. Untuk itu, Pemerintah Daerah Maluku terus memperbaiki manajemen kepegawaian untuk mendorong terciptanya PNS sebagai aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional dan melayani.

Upaya untuk meningkatkan integritas aparatur telah didorong pula oleh Pemerintah Daerah melalui penandatanganan fakta integritas antara Pemerintah Daerah Maluku dengan pemerintah daerah kabupaten/kota se Maluku, dan antara Gubernur Maluku dengan pimpinan SKPD lingkup pemerintah daerah Maluku.

2.7.9. Ekonomi

Perekonomian Daerah Maluku menunjukkan kinerja yang semakin baik, sebagaimana ditunjukkan oleh semakin meningkatnya PDRB, Pendapatan Perkapita, olehnya itu menjadi suatu tantangan bagi daerah yakni bagaimana daerah dapat mempertahankan kondisi perekonomiannya agar tetap stabil. Dari sisi produktivitas, daerah harus mampu meningkatkan produktivitasnya dengan jalan memunculkan produk-produk baru dari tahun ke tahun serta Kualitas jasa yang diberikan juga harus terus ditingkat.

Investasi di Maluku terus meningkat tetapi kontribusinya masih terbatas untuk perekonomian daerah Maluku. Peningkatan investasi di Maluku belum didukung secara optimal oleh penyaluran kredit perbankan untuk bidang investasi yang ditandai oleh rendahnya kredit untuk investasi dibandingkan kredit konsumsi. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan untuk penyaluran dana KUR di Maluku meskipun semakin meningkat tetapi pemanfaatannya juga masih rendah atau belum optimal dalam mendorong pengurangan kemiskinan di Maluku.

Bidang **Perindustrian** belum mampu memberikan peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian Maluku, sebagaimana ditunjukkan oleh masih rendahnya kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Maluku.

Sektor **Perdagangan** meskipun memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Maluku, tetapi belum mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah Maluku sebagaimana ditandai oleh masih rendahnya ekspor Maluku dibandingkan dengan impor atau dibandingkan dengan ekspor daerah lainnya di Indonesia. Sarana dan prasarana perdagangan yakni pasar di daerah ini juga masih terbatas, sehingga telah menjadi perhatian prioritas dari pemerintah Daerah Maluku untuk meningkatkan pembangunan dan penataan pasar di Maluku.

Bidang **Koperasi dan UMKM** masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk meningkatkan daya saingnya dalam kompetensi. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Koperasi dan UMKM ke depan masih menghadapi masalah yang terkait dengan belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat dari keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi nonpemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Sementara itu, Koperasi dan UMKM juga masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya. Permasalahan tersebut meliputi: (a) terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga Litbang; (b) kurangnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam peningkatan mutu dan desain produk; (c) dan masih rendahnya kualitas sumberdaya pelaku usaha UMKM.

Kelembagaan koperasi masih menghadapi masalah sebagai berikut, yaitu (a) kurangnya pemahaman anggota terhadap prinsip dan asas berkoperasi; (b) belum optimalnya fungsi koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya; serta (c) belum optimalnya peran pembina, penyuluh, dan lembaga gerakan koperasi.

Terkait dengan upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah telah mengembangkan program nasional pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui Kredit Usaha Rakyat. Namun di Maluku belum semua atau masih terdapat sebagian besar UMK yang belum dapat mengakses dana KUR terutama di Kabupaten/kota di kawasan perbatasan Negara, dan kabupaten pemekaran baru.

2.7.10. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemerintah Daerah Maluku terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan manfaat SDA dan peningkatan kualitas LH. Meskipun demikian, permasalahan pemanfaatan SDA yang belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup masih dihadapi yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas SDA ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin mengkhawatirkan akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak (*illegal and destructive fishing*).

Selain itu, meningkatnya konversi hutan dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya, serta masih kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian daerah Maluku.

Atas dasar masih tingginya potensi sumberdaya laut di Maluku , Pemerintah Daerah Maluku telah mendorong kebijakan pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, Pengembangan Pulau Buru dan Pulau Seram sebagai Lumbung Pangan (Beras), Pengembangan Pulau Mandiri pangan, Pengembangan Maluku sebagai provinsi rempah-rempah, maupun klaster-klaster peternakan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan lumbung ikan nasional adalah belum ada dukungan penuh dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan terkait pembangunan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, baik dalam bentuk payung hukum maupun program nyata, sebagai upaya untuk turut mendorong pihak swasta terlibat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku. Beberapa pelabuhan perikanan yang telah dibangun, hingga saat ini masih belum rampung, dan beberapa infrastruktur pendukung juga belum tersedia di sejumlah pelabuhan perikanan yang telah dibangun.

Dalam dokumen MP3EI Maluku telah disebut sebagai Pusat Pengelolaan Ikan dan dikembangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional namun dalam matriks indikasi infrastruktur belum terdapat program riil untuk mendukungnya.

Di Bidang Perikanan tangkap masih ditemukan masalah unit tangkap nelayan umumnya berskala kecil dengan menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana sehingga jangkauan penangkapan juga relatif terbatas dan terutama akibat adanya kondisi

cuaca ekstrim. Sedangkan masalah yang dihadapi dalam Budidaya perikanan adalah terbatasnya pengembangan areal budidaya, rendahnya nilai tambah dan adanya fluktuasi harga di tingkat nelayan, serta kegagalan panen akibat perubahan iklim.

Masalah yang masih dihadapi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan adalah (1) terbatasnya jaringan irigasi, (2) masih lemahnya penerapan dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk, (3) aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan masih lemah, (4) dampak perubahan iklim yang mempengaruhi budidaya dan hasil produksi, dan (5) distribusi bahan pangan antar wilayah yang terkendala dengan kondisi geografis dan iklim di Maluku sebagai wilayah kepulauan.

Kinerja Sektor Kehutanan di Maluku semakin menurun sebagaimana diindikasikan oleh semakin rendahnya kontribusi sektor ini untuk perekonomian daerah dan menurunnya produksi hasil hutan. Pemerintah Daerah Maluku terus berupaya meningkatkan produksi sektor kehutanan khususnya komoditas hasil hutan non kayu seperti minyak kayu putih melalui bantuan sarana dan prasarana pengolahan minyak kayu putih.

Wilayah Maluku memiliki potensi energi dan sumberdaya mineral yang beranekaragam, namun baru sebagian kecil yang telah dieksploitasi, seperti minyak bumi di Bula, Gas Bumi Masela, dan nikel di Seram Bagian Barat. Untuk itu, Pemerintah Daerah terus mendorong eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energy dan mineral di Maluku untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian Daerah Maluku.

Salah satu sumberdaya mineral yang saat ini ditemukan adalah emas di Pulau Buru. Emas di Pulau Buru ini telah ditambang oleh masyarakat dari berbagai penjuru tanah air tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, usaha pertambangan emas oleh masyarakat secara tradisional ini telah menimbulkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok di Kabupaten Buru dan menurunnya produksi beras di Pulau Buru arena sebagian petani telah beralih pekerja dari petani sebagai penambang.

Permasalahan sektor energi yang dihadapi di Maluku adalah laju pertumbuhan peningkatan permintaan energi akibat kegiatan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan, yang terdiri dari ribuan pulau, serta luasnya wilayah Maluku, mempengaruhi tingkat pelayanan, efisiensi dan keandalan system penyediaan dan penyaluran energi di seluruh Maluku. Masih banyak daerah di Maluku yang belum mengakses jaringan listrik. Untuk itu, Pemerintah Daerah Maluku terus mendorong pemanfaatan energy alternaif seperti panas bumi, tenaga air, tenaga matahari untuk peningkatan pelayanan kebutuhan listrik di Maluku.

Kinerja pembangunan kepariwisataan Maluku menunjukkan kinerja yang semakin baik sejalan pasca Event Sail Banda di Maluku tahun 2010. Melalui event internasional ini, pariwisata Maluku terutama pariwisata bahari telah dipromosikan kepada dunia internasional. Beberapa permasalahan masih dihadapi sector Pariwisata Maluku, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Belum terpadunya pengelolaan aspek daya tarik pariwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait secara sistematis, terencana,

dan berkelanjutan, sehingga menyebabkan sektor pariwisata Maluku belum mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan kalah bersaing di pasar global.

- b. Masih terbatasnya dukungan: a) aksesibilitas seperti prasarana transportasi darat, laut dan udara, dan prasarana penunjang pariwisata; b) ketersediaan fasilitas umum; c) penataan dan diversifikasi daya tarik pariwisata, seperti penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*), penilaian tujuan (*destination assessment*), dan pemanfaatan basis data; serta d) kondisi keamanan dan kenyamanan di Maluku yang sering terganggu.
- c. Jumlah investasi dalam pembangunan pariwisata di Maluku masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh kondisi ekonomi dan situasi keamanan, serta iklim investasi yang belum kondusif. Demikian pula belum optimalnya kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata di Maluku.

Berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan **Lingkungan Hidup** telah dilakukan namun pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus terjadi. Salah satunya adalah pencemaran dari eksploitasi sumberdaya mineral emas di Kabupaten Buru. Tingkat pencemaran terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah pertambangan emas ini dikhawatirkan melebihi baku mutu lingkungan, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi menurun. Untuk itu diperlukan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik di wilayah pertambangan emas pulau Buru.

Permasalahan yang juga dirasakan dalam pembangunan sektor Kehutanan di Maluku adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, serta masih tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan. Permasalahan lain yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan tekanan peningkatan jumlah penduduk seperti di Kota Ambon.

Sektor Kelautan dan Perikanan di Maluku masih banyak menghadapi kendala dalam upaya mengoptimalkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan kekayaan plasma nutfah. Masih merebaknya praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) dengan atau tanpa ijin diperhadapkan dengan upaya pengendalian dan pengawasan illegal fishing masih belum optimal, akibat kurangnya sarana dan alat di laut. Sementara itu, penangkapan ikan yang merusak lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan racun (potasium) masih banyak terjadi. Kegiatan ini menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting.

Selain itu, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil. Pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi. Wilayah perbatasan dan terpencil di Maluku kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasan, wilayah

perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara.